



INFORMASI PUBLIK:

Hak Anda untuk tahu!

www.kip.bantenprov.go.id

KLIPING KORAN KOMISI INFORMASI PROVINSI BANTEN

Harian Nasional : Kompas Media Indonesia Seputar Indonesia

..... (lainnya)

Harian Lokal : Radar Banten Kabar Banten Satelit News

Banten Raya Post (lainnya)

Hari/Tanggal : RABU 16 SEPTEMBER 2015 Halaman Koran : 15 & 14

Badan Publik Harus Terbuka

PPID Pembantu Belum Berfungsi Maksimal

SERANG - Belum lama ini, Komisi Informasi (KI) Provinsi Banten meng-

gelar road show keterbukaan informasi ke sejumlah SKPD di lingkungan Pemprov Banten dan sejumlah pemerintah kabupaten/kota se-Banten. Hasilnya, masih banyak pejabat pengelolaan informasi dan dokumentasi (PPID) pembantu di SKPD yang tidak berfungsi. Ketua Divisi Sosialisasi Advokasi dan

Edukasi (SAE) KI Banten Ade Jahran mengatakan bahwa implementasi dari surat keputusan gubernur tentang pembentukan PPID masih dipandang sebelah mata. Tidak hanya di tingkat pemeritahan provinsi, tetapi juga di tingkat pemerintahan kabupaten dan kota. "Berdasarkan hasil road show

beberapa waktu lalu, masih banyak ditemukan PPID yang tidak difungsikan di SKPD. Padahal, sudah ada SK gubernur, SK bupati, dan SK walikota, tetapi belum diimplementasikan," katanya.

Ia mengatakan, belum berfungsinya

Ke hlm 14

Badan Publik...

PPID pembantu terlihat dari tidak adanya infrastruktur pendukung PPID. Seperti belum ada meja informasi, ruang informasi, maupun personelnya. "PPID ada di SKPD, tetapi tidak ada meja informasi, ruang informasi, personelnya juga, baru ada sekretarisnya saja. Intinya, masih belum sesuai harapan sebagaimana Undang-Undang KIP," kata Ade.

Menurutnya, kondisi seperti ini harus menjadi perhatian pemerintah terutama pimpinan badan publik itu sendiri. Sebab, dalam waktu dekat ini secara nasional akan diumumkan pemerintakan daerah terkait dengan keterbukaan informasi publik. "Oktober mendatang sudah mulai penilaian. Harapannya semua PPID pembantu berfungsi optimal, ada meja kerja, ruang kerja, dan terintegrasi antara PPID pembantu dan PPID utama. Bagaimana Banten mau mempertahankan posisi empat besar kalau PPID tidak berfungsi sebagaimana mestinya?" ujarnya.

Dari hasil road show, juga diketahui kendala-kendala yang mengakibatkan PPID tak berfungsi, antara lain PPID terkena mutasi, anggaran kurang, dan minimnya sumber daya manusia (SDM). "PPID mengeluh karena tidak diberi anggaran yang lebih. Kemudian, personelnya juga kurang. Informasi dari PPID utama, banyak juga PPID pembantu yang tidak mau menyerahkan informasi, data, untuk dipasang di website," ujarnya

Menurutnya, dalam era keterbukaan informasi publik saat ini, harus ada keseriusan dari badan publik dalam upaya menciptakan pemerintahan yang transparan dan akuntabel. PPID merupakan salah satu infrastruktur keterbukaan informasi publik yang menyajikan informasi publik seperti tentang keuangan, bencana, kegiatan-kegiatan dinas, yang tidak masuk kategori informasi yang dikecualikan. "Keberhasilan Banten terkait keterbukaan informasi bukan dari KI, tetapi lebih besar adalah peran dari badan

Dari hlm 13

publiknya. Kalau tidak ada keseriusan, percuma saja. Walaupun KI sudah berupaya jor-joran, percuma saja kalau PPID-nya melempem," ujarnya.

Menanggapi hal tersebut, Kepala Biro Humas dan Protokol Setda Pemprov Banten Deden Apriandi mengatakan bahwa pembenahan PPID di setiap SKPD memang pekerjaan berat. Pihaknya telah menyurati SKPD untuk memperhatikan penggunaan PPID secara maksimal. "Kami pada dasarnya sudah menyurati setiap SKPD. Namun, tampaknya direspons bervariasi. Ada yang memperhatikan, ada pula yang tidak," terangnya.

Deden menilai bahwa keberadaan PPID penting. Sebab, PPID merupakan salah satu langkah peningkatan pelayanan terhadap masyarakat. "Keterbukaan informasi juga bagian dari pelayanan masyarakat. Jika hal ini tidak dimaksimalkan, akan memengaruhi kualitas pelayanan SKPD tersebut. Jadi, itu sangat penting," ujarnya. (quy/alt/dwi)